

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan tahunan adalah media yang digunakan oleh perusahaan yang *go public* untuk mengkomunikasikan informasi kepada pihak luar manajemen. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti *investor*, karyawan, *kreditor*, pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya bergantung pada pelaporan dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan untuk membuat keputusan. Bhuiyan dan Biswas (dalam Hikmah, dkk, 2011) menjelaskan pentingnya pengungkapan *corporate governance*. Pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan *transparan* dapat menambah nilai bagi para *stakeholder*. Jika tidak ada pengungkapan *corporate governance* yang memadai, para *stakeholder* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Di Indonesia, isu mengenai *corporate governance* muncul setelah terjadinya *krisis multidimensi* pada pertengahan 1997. Krisis ini dimulai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kemudian menghancurkan sendi-sendi ekonomi semua perusahaan. Menurut hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (Asia Development Bank), krisis yang terjadi di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan *corporate governance*

(Husein dalam Hikmah dkk, 2011). Berkembangnya isu transparansi dalam *corporate governance* akan mendorong adanya peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari aspek *corporate governance* suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti *investor*, pemerintah, dan penyusun standar.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) telah mempublikasikan pedoman umum *corporate governance* pada tahun 2006 sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip *corporate governance*, termasuk rekomendasi mengenai pengungkapan praktek *corporate governance*. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan *corporate governance* perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006.

Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan *investor*, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para *investor* tentang pengembalian atas *investasi* yang telah mereka tanamkan. Dengan demikian, secara agregat, hal tersebut akan mengakibatkan aliran masuk modal (*capital inflows*) ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan aliran keluar modal

(*capital outflows*) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga-harga saham di negara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata uang negara tersebut (Sabrinna, 2010).

Riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 2002 (dalam Sabrinna, 2010) menemukan alasan utama perusahaan menerapkan *corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa *implementasi corporate governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan *implementasi corporate governance* berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *corporate governance*, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan kinerja perusahaan (Sabrinna, 2010).

Labelle dalam Kusumawati (dalam Hikmah, dkk 2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan praktek *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi praktek pengungkapan *corporate governance* kemungkinan tidak sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengungkapan keuangan (*financial disclosure*). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate governance*, yaitu faktor karakteristik spesifik perusahaan dan faktor *corporate governance* itu sendiri. Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate*

governance menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian terdahulu membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Kusumawati (2007), dan Rini (2010) melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang membuktikan adanya pengaruh secara signifikan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Ukuran perusahaan dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh publik sehingga mengungkapkan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan *akuntabilitas publik*. Temuan ini sama dengan hasil penelitian Hikmah dkk, (2011) yang membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Murtanto dan Elvina (2005) yang membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Umur perusahaan merupakan lamanya perusahaan beroperasi menjadi perusahaan publik (Rini, 2010). Perusahaan dengan umur yang lebih lama akan memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan tahunan. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut lebih mengetahui kebutuhan penggunaannya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus

dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan yang semakin tua umurnya akan semakin berpengalaman dalam melakukan pengungkapan *corporate governance*, hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua umurnya telah melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dalam pengungkapan *corporate governance*. Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian Yularto dan Chariri (2002), Simanjuntak dan Widiastuti (2004), membuktikan umur perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hikmah, dkk (2011) membuktikan pengaruh negatif secara signifikan umur *listing* perusahaan terhadap luas *pengungkapan corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Marwata (2000) , Alsaeed (2006), Bhuiyan dan Biswas (2007) dan Rini (2010), membuktikan umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Alsaeed (2006) membuktikan kepemilikan *dispersi* mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*, dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh investor individu dengan jumlah saham yang beredar. Seperti hasil penelitian Kusumawati (2007), membuktikan kepemilikan *dispersi* berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Daoud (2005), Rini (2010), dan Hikmah, dkk (2011), membuktikan kepemilikan *dispersi* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada (Hikmah, dkk 2010). *Profitabilitas* adalah variabel yang secara luas diteliti dalam banyak penelitian yang berhubungan dengan pengungkapan *corporate governance* seperti dalam penelitian Fitriani (2001), Simanjuntak dan Widiastuti (2004), Laraswita dan Indrayani (2010) membuktikan *profitabilitas* sebagai variabel yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, dengan alasan pendapatan yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk memperluas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Ariny (2010), dan Hikmah, dkk (2011) membuktikan *profitabilitas* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan (Hikmah, dkk 2011). Dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris kinerja direksi semakin efektif sehingga berdampak pada pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan akan semakin luas. Teori tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arifin (2002), Sembiring (2005), dan Hikmah, dkk (2011) yang membuktikan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Bhuiyan dan Biswas (2007), dan Rini (2010) membuktikan ukuran dewan komisaris tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sabrina, 2010). Penelitian yang dilakukan Hadi dan Sabeni (2002), Simanjuntank dan Widiastuti (2004), dan Bambang (2006) membuktikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Ainun dan Fuat (2000), dan Marwata (2001), membuktikan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, internal auditor serta anggota independen, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan auditor, dan memastikan manajemen melakukan tindakan korektif yang tepat terhadap hukum dan regulasi (Suryono, 2011). Komite audit juga melakukan koordinasi dan rapat secara intensif agar dalam menjalankan pengawasan laporan keuangan dan pelaksanaan pengungkapan *corporate governance* menjadi semakin baik. Penelitian yang dilakukan Collier (1993), Waryanto (2010) dan Effendy (2005) membuktikan komite audit berpengaruh positif

secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Santoso, (1992), dan Arifin et al (2001) membuktikan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan analisis tambahan untuk mengetahui pengaruh luas pengungkapan *corporate governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya (Sabrinna, 2010). Kemampuan perusahaan dalam menjelaskan oprasionalnya hanya dapat dilakukan dengan cara melakukan pengungkapan *corporate governance*. Menurut penelitian Klapper dan Love (2002), Gompers, dkk (2003), dan Lastanti (2004) Hastuti (2004), dan Darmawati, dkk (2005) membuktikan hubungan positif secara signifikan antara luas pengungkapan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Johnson, dkk (2000) Suranta dan Machfoedz (2003), dan Sukamulja (2004), membuktikan luas pengungkapan *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan *dispersi*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan BUMN. Serta membuktikan pengaruh luas pengungkapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan pemilihan sektor

perusahaan BUMN sebagai sampel dikarenakan karakteristik tata kelola dan kepemilikan saham BUMN yang berbeda dengan industri lainnya. Sektor ini juga sangat erat kaitannya dengan *corporate governance* karena adanya jual beli saham yang dilakukan oleh investor. Perusahaan BUMN diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada *stakeholder* mengenai pelaksanaan *corporate governance* karena seringnya mengalami kerugian dan terjadi korupsi, sehingga pengungkapan *corporate governance* menjadi sangat penting dilakukan. Selain itu penjualan saham BUMN yang berbasis kepercayaan maka memerlukan sarana untuk meningkatkan kepercayaan *investor*. Kepercayaan *investor* dapat ditingkatkan dengan meningkatkan *transparansi*. Salah satunya dengan meningkatkan luas pengungkapan *corporate governance*, dan secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Dalam Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan” (Studi Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI)**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hikmah dkk, (SNA 14 Aceh 2011). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada sampel penelitian menggunakan perusahaan BUMN yang memiliki laporan tahunan terdaftar di BEI tahun 2009 sampai tahun 2011. Peneliti juga menambah variabel independen baru yaitu umur perusahaan, kepemilikan manajerial dan komite audit serta menambah variabel dependen baru yaitu kinerja perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Serta pengaruh luas pengungkapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: “Apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan *dispersi*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?” dan “Apakah luas pengungkapan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?”

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan BUMN sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi. Kedua, penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan *corporate governance* untuk melihat seberapa luas perusahaan melakukan pengungkapan *corporate governance* oleh karena itu batasan masalah kedua penelitian ini adalah unsur subyektifitas dalam mengukur luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan keuangan perusahaan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan *dispersi*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan komite audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan analisis

tambahan dengan tujuan untuk menguji secara empiris luas pengungkapan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. BAPEPAM untuk bahan pertimbangan perumusan standar dan peraturan yang berkaitan dengan *corporate governance* di Indonesia. Serta mendorong perusahaan BUMN di Indonesia melakukan pengungkapan *corporate governance* yang lebih luas.
2. Manajemen perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Calon *investor*, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan *investasi*.
4. Calon *kreditur*, sebagai bahan pertimbangan dalam kaitannya dengan pemberian kredit pada perusahaan.
5. Peneliti berikutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan pengungkapan *corporate governance* dan kinerja perusahaan secara lebih luas.